



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin, 27 Oktober 2025



RINGKASAN BERITA HARI NI

Enam Ruas Jalan Segera Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 11 Miliar



RUSAK: Salah satu Jalan Pepelegi Kecamatan Waru yang akan diperbaiki.

KOTA-Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo terus mempercepat pemeliharaan dan peningkatan jalan di sejumlah titik. Total ada enam ruas yang menjadi prioritas karena rawan banjir dan mengalami kerusakan.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan, enam ruas tersebut saat ini sudah masuk tahap lelang. Pekerjaan difokuskan pada pemeliharaan dan pengaspalan ulang, bukan peningkatan seperti betonisasi. Enam ruas itu meliputi Jalan Balai Desa Sidokerto di Buduran, Jalan

Pemkab Hentikan Gaji P3K yang Terlibat Pesta Gay

KOTA-Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas terhadap oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terlibat pesta seks sesama jenis di Surabaya.

Pegawai berinisial MB itu diketahui bertugas di Bagian Umum Sekretariat Daerah dan baru enam bulan bekerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apriadawati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektori, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Bupati Sidoarjo. Hal tersebut dilakukan setelah ia menerima laporan resmi dari pihak kepolisian. "BKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes



TEGAS: Suasana saat penggrebekan pesta gay di Surabaya.

Surabaya dan menerima surat penahanan yang bersangkutan," ucapnya, Minggu (26/10).

Sebagai tindak lanjut administratif, Pemkab Sidoarjo menjatuhkan sanksi berupa penghentian gaji terhadap MB. Kebijakan itu diberlakukan selama proses hukum masih

Percepat Pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Kebijakan Perda tersebut dinilai penting sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren, sekaligus menjadi landasan hukum dalam pemberian fasilitas yang adil dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren di Gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (25/10/2025).

Subandi mengatakan, proses pembentukan Perda tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, forum pesantren, dan tokoh masyarakat. Ia berharap, Perda Fasilitas Pesantren nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Hadisnya Raperda Fasilitas Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan," ujarnya.

Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, terdapat sekitar 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo (data BPS 2020). Menurut

nya, jumlah tersebut menjadi alasan kuat pentingnya payung hukum agar pesantren dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo atas inisiatifnya menyusun Raperda Fasilitas Pesantren. Ini langkah nyata bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Sidoarjo," tambahnya. ● Lee

LEGISLASI



KOLABORASI: Bupati Sidoarjo Subandi (kanan) menghadiri rapat paripurna di DPRD Sidoarjo, Sabtu (25/10).

Bupati Dukung Perda Pesantren

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menyambut hangat pembahasan raperda fasilitas pesantren yang digagas anggota legislatif. Bupati Sidoarjo Subandi menilai pentingnya perda itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap eksistensi pesantren.

"Kami siap berkolaborasi dengan DPRD dalam pembahasan raperda fasilitas pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, sampai saat ini ada kurang lebih 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan jumlah santri mencapai 14.992 santri. Jumlah santri tersebut juga tercatat di BPS Sidoarjo.

Raperda Fasilitas Pesantren tersebut, diharapkan agar eksistensi pondok pesantren dan santri di Kabupaten Sidoarjo lebih berkembang dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan kepada Kabupaten Sidoarjo. (kus.dre)

Pemkab Stop Gaji Tersangka Pesta Asusila

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo mengambil tindakan tegas. Lewat badan kepegawaian daerah (BKD), mereka menghentikan gaji oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) berinisial MB yang terlibat kasus pesta seks sesama jenis (gay) di Surabaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apriadawati menyatakan, keputusan tersebut diberlakukan selama proses hukum masih berjalan hingga ada putusan tetap dari pengadilan. "BKD sudah menyampaikan surat penghentian gaji yang bersangkutan," ujarnya kemarin (26/10).

Dia mengungkapkan, MB sebelumnya merupakan staf bagian umum di Sekda Sidoarjo. Fenny memastikan telah menerima laporan penahanan

MB dari kepolisian. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan inspektori hingga bupati. Dia menegaskan, sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK. Langkah tegas itu diambil untuk menjaga marwah pemerintah daerah serta memastikan aparatur tetap berperilaku sesuai dengan norma hukum dan moral.

"Mengenal pemutusan gaji, masih dalam tahap evaluasi dan penilaian tim BKD," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MB terlibat pesta seks bertajuk Siwalan Party bersama 34 pria di Surabaya, Minggu (19/10). Pria 39 tahun tersebut merupakan admin pembantu grup WhatsApp Surabaya X-Male 1. (eaa/dri)

BKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan menerima surat penahanan yang bersangkutan."

Fenny Apriadawati Sekda Pemkab Sidoarjo



PERIKSA KELAYAKAN: Petugas mengecek kendaraan di UPT PKB Dishub Sidoarjo, Sabtu (25/10).

Genjot Uji Kir, Dishub Siapkan Razia Angkutan

SIDOARJO - Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo terus berupaya menggenjot uji kir untuk angkutan umum atau angkutan barang. Mereka bakal meningkatkan razia kir di jalur-jalur utama kawasan industri.

"Kami akan melakukan operasi gabungan bersama satlantas," kata Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki kemarin (26/10).

Saat ini, dia menyampaikan, setiap bulan tercatat 2.500-3.000 kendaraan menjalani uji kir di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) milik Dishub Sidoarjo. Jumlah itu jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 1.500-2.000 kendaraan.

"Uji kir wajib bagi pemilik angkutan umum maupun barang. Ketika tidak ada sanksi atau denda, banyak yang mengabaikan. Padahal, uji kir ini sangat penting untuk

keselamatan," ujarnya. Dia memastikan, fasilitas pengujian di UPT PKB Dishub Sidoarjo telah memenuhi akreditasi A dan dilengkapi peralatan modern. Semua fasilitas sudah memenuhi standar nasional. Terlebih, biaya uji kir di Kabupaten Sidoarjo digratiskan sejak tahun lalu. "Jadi, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melakukan uji kir," tegasnya. (eaa/dri)

Seminggu ke Depan, Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

SEDATI-BMKG Juanda mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Sidoarjo.

Praktikawan BMKG Juanda, Levi Ratnasari mengatakan, saat ini Jawa Timur termasuk masa peralihan dan kemarau ke musim hujan.

Menurutnya, dinamika atmosfer yang tidak stabil berpotensi menimbulkan hujan disertai petir dan angin kencang.

"Wiyah Jatim juga sedang berada dalam masa pancaroba, gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) turut menambah pasokan uap air, sehingga peluang terjadinya hujan masih cukup tinggi,"



WASPADA: Praktikawan BMKG Juanda saat memantau pergerakan awan.

ucapnya, Minggu (26/10). Levi menjelaskan, pertumbuhan awan cumulonimbus yang meningkat menjadi potensi utama cuaca ekstrem. Awan jenis tersebut bisa menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

"Potensi angin kencang tetap ada, kami mengimbau BPBD terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan," tuturnya. (sai/ya)

RSOS Edukasi Bersama Survivor Kanker Payudara

SIDOARJO - Breast Cancer Survivor RSOS (RSOS Edukasi Bersama Survivor Kanker Payudara) akan menggelar kegiatan edukasi bersama komunitas kanker payudara lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (27/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kanker payudara, terutama mengenai pencegahan, deteksi dini, dan penanganan. Acara akan dihadiri oleh praktisi kesehatan, relawan RSOS, dan perwakilan dari komunitas kanker payudara lainnya.

RSOS adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan dan dukungan bagi perempuan yang telah menjalani pengobatan kanker payudara. Mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling, dukungan finansial, dan akses ke layanan kesehatan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker payudara dan mendorong lebih banyak perempuan untuk melakukan pemeriksaan dini. Lokasi kegiatan akan diumumkan lebih lanjut. (eaa/dri)

Bupati Ajak BPD Sinergi

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk bersinergi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.

Subandi mengatakan, BPD memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah kabupaten. Ia berharap, dengan sinergi yang baik, pelayanan publik akan lebih optimal dan pembangunan desa akan lebih maju.

"Kami akan terus mendukung BPD dalam menjalankan tugasnya," ujarnya. Sinergi ini akan dilakukan melalui berbagai forum, termasuk rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke desa-desa.

Subandi juga mengajak masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan sinergi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Sidoarjo akan berkembang dan sejahtera. (eaa/dri)



Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Kepala BPD Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk bersinergi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Subandi mengatakan, BPD memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah kabupaten. Ia berharap, dengan sinergi yang baik, pelayanan publik akan lebih optimal dan pembangunan desa akan lebih maju. "Kami akan terus mendukung BPD dalam menjalankan tugasnya," ujarnya. Sinergi ini akan dilakukan melalui berbagai forum, termasuk rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke desa-desa. Subandi juga mengajak masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan sinergi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Sidoarjo akan berkembang dan sejahtera. (eaa/dri)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretarisariat DPRD Sidoarjo

Percepat Pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Kehadiran Perda tersebut dinilai penting sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren, sekaligus menjadi landasan hukum dalam pemberian fasilitas yang adil dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren di Gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu siang (25/10/25).

Bupati Sidoarjo H. Subandi menilai, Raperda Fasilitas Pesantren dapat menjadi sarana perlindungan hukum dan penguatan bagi lembaga pendidikan berbasis agama. Kehadirannya diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara pesantren dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan, ekonomi umat, serta pembentukan karakter generasi muda yang religius.

"Terkait pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren ini, kami siap berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo, baik dalam proses pembahasan selanjutnya, penyusunan naskah akademik yang lebih kuat, maupun pe-

nyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ucapnya.

Subandi menegaskan, proses pembentukan Perda tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, forum pesantren, dan tokoh masyarakat. Ia berharap, Perda Fasilitas Pesantren nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

"Hadirnya Raperda Fasilitas Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan," ujarnya.

Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, terdapat sekitar 192 pesantren dengan 14.992 santri di Kabupaten Sidoarjo (data BPS 2020). Menurutnya, jumlah tersebut menjadi alasan kuat pentingnya payung hukum agar pesantren dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo atas inisiatifnya menyusun Raperda Fasilitas Pesantren. Ini langkah nyata bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Sidoarjo," tambahnya. ● Loe



CS Dipindai dengan CamScanner

Seminggu ke Depan, Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

SEDATI-BMKG Juanda mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Sidoarjo.

Prakirawan BMKG Juanda, Levi Ratnasari mengatakan, saat ini Jawa Timur terutama Sidoarjo tengah memasuki masa peralihan dari kemarau ke musim hujan.

Menurutnya, dinamika atmosfer yang tidak stabil berpotensi menimbulkan hujan disertai petir dan angin kencang.

"Wiayah Jatim juga sedang berada dalam masa pancaroba, gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) turut menambah pasokan uap air, sehingga peluang terjadinya hujan masih cukup tinggi,"



WASPADA: Prakirawan BMKG Juanda saat memantau pergerakan awan. ucapnya, Minggu (26/10).

Levi menjelaskan, pertumbuhan awan cumulonimbus yang meningkat menjadi pe-

micu utama cuaca ekstrem. Awan jenis tersebut bisa menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

"Potensi angin kencang tetap ada, kami mengimbau BPBD terdampak untuk meningkatkan kewaspa-

daan," ujarnya.

Karena itu, BMKG meminta masyarakat lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Kewaspadaan terutama diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari risiko tertimpa pohon tumbang atau tersambar petir.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano menyatakan, pihaknya terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci agar penanganan bencana bisa dilakukan cepat dan tepat.

"Sebelumnya hujan deras dan angin kencang sempat menyebabkan satu rumah ambruk serta pohon tumbang di wilayah Gedangan dan Candi," tutupnya. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Pemkab Sidoarjo dan DPRD Mendukung Pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren

Sidoarjo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Dalam rapat Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (25/10) akhir pekan lalu.

Bupati Sidoarjo Subandi, menyatakan mendukung, karena adanya Raperda tersebut sebagai pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren.

“Eksekutif akan siap berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo. Mulai dari proses pembahasan, menyusun naskah akademik yang lebih kuat maupun penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya dalam paripurna tersebut.

“Kami akan melibatkan semua pihak dalam kolaborasi pembentukan Perda tentang Fasilitas Pesantren ini,” lanjutnya.

Di antaranya meliputi dengan organisasi keagamaan, forum pesantren maupun tokoh masyarakat. Perda Fasilitas Pesantren tersebut, menurutnya, diharapkan tidak hanya bersifat administratif saja, namun benar-benar akan bisa menjawab kebutuhan real di lapangan.

Raperda fasilitas Pesantren tersebut, diinginkan dapat menjadi sarana dan jaminan hukum serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, sampai saat ini ada kurang lebih 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan jumlah santri mencapai 14.992 santri. Jumlah santri tersebut juga tercatat di BPS Sidoarjo.

Raperda fasilitas terhadap Pesantren, diharapkan agar eksistensi pondok pesantren dan santri di Kabupaten Sidoarjo lebih berkembang dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan kepada Kabupaten Sidoarjo. [kus.dre]

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa
Biru Bicara Biru Bersuara



Santri, Ansor dan Polisi Gelar Motoran Klasik

Sidoarjo, Memorandum

Nuansa Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025, Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Ansor Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan motoran klasik dan kampanye tertib berlalu lintas.

Kegiatan iring-iringan motor klasik yang berlangsung Sabtu, (25/10), dimulai dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam menuju ke Mapolresta Sidoarjo dan *finish* di lokasi ponpes yang berada di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.

Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam KH Abdul Wahid Harun menje-



Kompol Jodi Indrawan bersama santri, aktivis Ansor di kegiatan motoran klasik dan kampanye tertib berlalu lintas.

laskan, kegiatan ini sebagai bukti eksistensi santri untuk selalu siap berkolaborasi de-

ngan pihak mana saja. Salah satunya dengan Kepolisian dalam mewujudkan kondus-

sifitas kamtibmas.

"Dengan semangat Hari Santri Nasional, kami siap bersama mendukung kamtibmas yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.

Tiba di Mapolresta Sidoarjo, rombongan santri mendapatkan sosialisasi tertib berlalu lintas dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Jodi Indrawan mengapresiasi kegiatan tersebut. "Kami mengajak berbagai pihak, termasuk santri pada kegiatan motoran klasik Hari Santri Nasional untuk turut membudayakan tertib berlalu lintas ke masyarakat," pintanya. (san/day)

CS Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



RS Onkologi Surabaya (RSOS) gelar "Shake It for Pink : Zumba & Health Education" di Hotel Aston Sidoarjo berkolaborasi dengan Komunitas CAMAR (Camamae Reach to Recovery) Sidoarjo.

RSOS Edukasi Bersama Survivor Kanker Payudara

SIDOARJO - Breast Cancer Awareness Month atau Bulan Kewaspadaan Kanker Payudara yang jatuh pada Bulan Oktober, ditetapkan WHO & Kemenkes dan diperingati setiap tahunnya, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit kanker payudara. Rumah Sakit Onkologi Surabaya (RSOS), yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim 184 Surabaya, sesuai dengan salah satu misinya, ingin menginspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan untuk lebih aware dan peduli akan kanker payudara.

Dalam rangka puncak peringatan Breast Cancer Awareness Month 2025, RS Onkologi Surabaya (RSOS) menggelar kegiatan bertema "Shake It for Pink : Zumba & Health Education" yang dikemas dengan penuh semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kesehatan. Acara yang berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo berkolaborasi dengan Komunitas CAMAR (Camamae Reach to Recovery) Sidoarjo ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, terdiri dari masyarakat umum, breast cancer survivor, rekanan korporat, RSOS Family, serta dokter dan staf RSOS.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi seluruh RSOS Family dan berbagi ilmu kesehatan khususnya terkait kanker payudara. Melalui aktivitas zumba

yang energik dan menyenangkan, para peserta diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker, khususnya kanker payudara.

Selain sesi olahraga, acara ini juga diisi dengan edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dr. Dwirani R. Pratiwi Sp.B, FICS (Breast Surgeon RS Onkologi Surabaya). Dalam sesi ini, Rumah Sakit Onkologi Surabaya ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa kunci dalam penyembuhan kanker payudara adalah pasien datang pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Saat yang tepat adalah ketika kanker ditemukan dalam keadaan dini, lakukan pemeriksaan berkala sebelum ada keluhan.

"Salah satu caranya a. dengan rutin melakukan SaDaRi: Lakukan Sadari sebulan sekali, lengkapi dengan skrining USG/Mamografi sesuai rekomendasi umur, segera periksa ke dokter apabila ada perubahan atau keluhan pada payudara," katanya.

Menurutnya tempat yang tepat adalah pelayanan kesehatan payudara yang terintegrasi, menerapkan pelayanan sesuai standar khusus penanganan kanker payudara, dan memiliki koordinasi tim medis yang ahli di bidangnya peserta mendapatkan pengetahuan seputar deteksi dini, perawatan, serta dukungan psikologis bagi penyintas kanker payudara.

"Harapan hidup survivor kanker terus meningkat dari 60 persen menjadi 30 persen. Jadi jangan pesimis dulu misal terindikasi kanker. Asalkan terdeteksi secara dini, bisa sembuh dan punya harapan hidup yang tinggi. Masalahnya di Indonesia, 60 persen pasien dibawa saat stadium lanjut, ini tantangannya bagi semua pihak untuk edukasi dan menyadarkan perlunya periksa kalau ada perubahan dalam tubuh," ujar dr. Dwirani.

Sementara dr. Sidharta Himawan Giri, Sp.B, FICS (Breast Surgeon RS Onkologi Surabaya) menambahkan "Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap kanker payudara, sekaligus menunjukkan bahwa dukungan dan semangat bisa menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan," ujarnya.

Menuurutnya makin dini diketahui dan dideteksi, jenis kanker apapun bisa dilakukan proses penyembuhan dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Kesadaran masyarakat akan penyakit kanker terus ditingkatkan dengan berbagai edukasi berkelanjutan.

Kegiatan "Shake It for Pink" menjadi simbol sinergi dan harapan bagi para penyintas kanker, keluarga, dan masyarakat umum untuk terus bergerak bersama dalam menyebarkan semangat hidup sehat dan peduli sesama. • Imm

Bupati Ajak BPD Sinergi

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi secara resmi membuka acara Rapat Kerja Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu sore (25/10/25).

Acara tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto, Direktur Bank Delta Artha Sidoarjo, Kepala Kantor Cabang BPJS Sidoarjo, Ketua PKDI Sidoarjo, dan Ketua PPD Sidoarjo.

Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut sebagai forum strategis untuk memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa.

"Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, namun merupakan wadah penting bagi BPD dalam memastikan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bupati Subandi menegaskan, BPD memiliki peran penting sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemer-

intah. Ia berharap, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita ingin tidak ada lagi usulan desa yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Aspirasi masyarakat harus benar-benar tersampaikan dan sejalan dengan kebijakan nasional hingga daerah," tegasnya.

Selain membahas arah pembangunan desa, Bupati Subandi juga menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Ia menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan ASN harus sesuai aturan dan berdasarkan kinerja.

Terkait kesejahteraan anggota BPD, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperjuangkan peningkatan jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk manfaat bagi ahli waris jika terjadi musibah," ucapnya.

Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto menegaskan



Raker Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (25/10/25).

pentingnya komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas bagi para anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan serta perumusan kebijakan desa secara profesional dan sesuai regulasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo atas

dukungan terhadap kesejahteraan anggota BPD, termasuk melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan kebijakan tunjangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi turut memaparkan sejumlah program prioritas Pemkab Sidoarjo seperti penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

di beberapa kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat di Tulangan.

"BPD dan kepala desa harus kompak, ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan di desa," pungkas Bupati Subandi. • Loe

Pemkab Hentikan Gaji P3K yang Terlibat Pesta Gay

KOTA-Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas terhadap oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terlibat pesta seks sesama jenis di Surabaya.

Pegawai berinisial MB itu diketahui bertugas di Bagian Umum Sekretariat Daerah dan baru enam bulan bekerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apri-dawati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Bupati Sidoarjo. Hal tersebut dilakukan setelah ia menerima laporan resmi dari pihak kepolisian.

"BKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes



IST

TEGAS: Suasana saat penggrebekan pesta gay di Surabaya.

Surabaya dan menerima surat penahanan yang bersangkutan," ucapnya, Minggu (26/10).

Sebagai tindak lanjut administratif, Pemkab Si-

doarjo menjatuhkan sanksi berupa penghentian gaji terhadap MB. Kebijakan itu diberlakukan selama proses hukum masih

● Ke Halaman 10



Pemkab Hentikan...

berlangsung hingga ada keputusan tetap. "BKD sudah menyampaikan surat rekomendasi penghentian gaji yang bersangkutan," jelasnya.

Fenny menegaskan, Pemkab akan

memberikan sanksi sesuai dengan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk penegakan disiplin dan menjaga marwah pemerintah daerah. Dia menambahkan, Pemkab tetap menghormati proses hukum yang

sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Kami terus berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya terkait perkembangan kasus tersebut," pungkasnya. Diketahui, pesta seks gay bertajuk

Siwalan Party itu diikuti 34 pria di sebuah tempat di Surabaya pada Minggu (19/10). Kegiatan serupa disebut telah digelar sebanyak delapan kali sebelumnya. Polisi menjerat para tersangka dengan berbagai pasal dalam Undang-

Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, 25 peserta lainnya dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (sai/vga)



Enam Ruas Jalan Segera Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 11 Miliar



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

RUSAK: Salah satu Jalan Pepelegi Kecamatan Waru yang akan diperbaiki.

KOTA-Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo terus mempercepat pemeliharaan dan peningkatan jalan di sejumlah titik. Total ada enam ruas yang menjadi prioritas karena rawan banjir dan mengalami kerusakan.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan, enam ruas tersebut saat ini sudah masuk tahap lelang. Pekerjaan difokuskan pada pemeliharaan dan pengaspalan ulang, bukan peningkatan seperti betonisasi.

Enam ruas itu meliputi Jalan Balai Desa Sidokerto di Buduran, Jalan

● Ke Halaman 10



Enam Ruas Jalan...

Pepelegi di Waru, Jalan Sidodadi hingga Durungbedug di Candi, Jalan Masangan Wetan ke Suko di Sukodono, Jalan Desa Banjarbendo Sidoarjo dan Jalan Kletek ke Sukodono.

"Seluruh ruas tersebut masuk prioritas perbaikan karena kondisinya mu-

lai rusak, beberapa diantaranya juga menjadi akses penting warga dan jalur industri," ucapnya, Minggu (26/10).

Dwi menjelaskan, kerusakan terjadi karena jalan-jalan tersebut sering tergenang banjir saat musim hujan. Kondisinya kini berlubang dan bergelombang sehingga butuh segera diperbaiki. "Sekarang masih tahap evaluasi

administrasi," jelasnya.

Dia menargetkan, pengerjaan bisa dimulai paling lambat bulan depan. DPUBMSDA pun sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk perbaikan enam titik tersebut.

"Jalan Kletek hingga ke Sukodono mendapat porsi terbesar karena menjadi jalur utama kawasan industri,"

terangnya.

Selain enam ruas itu, pemeliharaan juga akan dilakukan di beberapa titik lain. Pihaknya tengah memetakan ruas mana saja yang perlu segera diperbaiki.

Dwi berharap seluruh pekerjaan bisa rampung sebelum akhir tahun ini. "Kami upayakan percepatan agar target selesai tepat waktu," pungkasnya. (sai/vga)





RS Onkologi Surabaya (RSOS) gelar "Shake It for Pink : Zumba & Health Education" di Hotel Aston Sidoarjo berkolaborasi dengan Komunitas CAMAR (Camamae Reach to Recovery) Sidoarjo.

RSOS Edukasi Bersama Survivor Kanker Payudara

SIDOARJO - Breast Cancer Awareness Month atau Bulan Kewaspadaan Kanker Payudara yang jatuh pada Bulan Oktober, ditetapkan WHO & Kemenkes dan diperingati setiap tahunnya, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit kanker payudara. Rumah Sakit Onkologi Surabaya (RSOS), yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim 184 Surabaya, sesuai dengan salah satu misinya, ingin menginspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan untuk lebih aware dan peduli akan kanker payudara.

Dalam rangka puncak peringatan Breast Cancer Awareness Month 2025, RS Onkologi Surabaya (RSOS) menggelar kegiatan bertema "Shake It for Pink : Zumba & Health Education" yang dikemas dengan penuh semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kesehatan. Acara yang berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo berkolaborasi dengan Komunitas CAMAR (Camamae Reach to Recovery) Sidoarjo ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, terdiri dari masyarakat umum, breast cancer survivor, rekanan korporat, RSOS Family, serta dokter dan staf RSOS.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi seluruh RSOS Family dan berbagi ilmu kesehatan khususnya terkait kanker payudara. Melalui aktivitas zumba

yang energik dan menyenangkan, para peserta diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker, khususnya kanker payudara.

Selain sesi olahraga, acara ini juga diisi dengan edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dr. Dwirani R. Pratiwi Sp.B, FICS (Breast Surgeon RS Onkologi Surabaya). Dalam sesi ini, Rumah Sakit Onkologi Surabaya ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa kunci dalam penyembuhan kanker payudara adalah pasien datang pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Saat yang tepat adalah ketika kanker ditemukan dalam keadaan dini, lakukan pemeriksaan berkala sebelum ada keluhan.

"Salah satu caranya a. dengan rutin melakukan SaDaRi: Lakukan Sadari sebulan sekali, lengkapi dengan skrining USG/Mamografi sesuai rekomendasi umur, segera periksa ke dokter apabila ada perubahan atau keluhan pada payudara," katanya.

Menurutnya tempat yang tepat adalah pelayanan kesehatan payudara yang terintegrasi, menerapkan pelayanan sesuai standar khusus penanganan kanker payudara, dan memiliki koordinasi tim medis yang ahli di bidangnya peserta mendapatkan pengetahuan seputar deteksi dini, perawatan, serta dukungan psikologis bagi penyintas kanker payudara.

"Harapan hidup survivor kanker terus meningkat dari 60 persen menjadi 30 persen. Jadi jangan pesimis dulu misal terindikasi kanker. Asalkan terdeteksi secara dini, bisa sembuh dan punya harapan hidup yang tinggi. Masalahnya di Indonesia, 60 persen pasien dibawa saat stadium lanjut, ini tantangannya bagi semua pihak untuk edukasi dan menyadarkan perlunya periksa kalau ada perubahan dalam tubuh," ujar dr. Dwirani.

Sementara dr. Sidharta Himawan Giri, Sp.B, FICS (Breast Surgeon RS Onkologi Surabaya) menambahkan "Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap kanker payudara, sekaligus menunjukkan bahwa dukungan dan semangat bisa menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan," ujarnya.

Menuurutnya makin dini diketahui dan dideteksi, jenis kanker apapun bisa dilakukan proses penyembuhan dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Kesadaran masyarakat akan penyakit kanker terus ditingkatkan dengan berbagai edukasi berkelanjutan.

Kegiatan "Shake It for Pink" menjadi simbol sinergi dan harapan bagi para penyintas kanker, keluarga, dan masyarakat umum untuk terus bergerak bersama dalam menyebarkan semangat hidup sehat dan peduli sesama. • Imm

Bupati Ajak BPD Sinergi

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi secara resmi membuka acara Rapat Kerja Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu sore (25/10/25).

Acara tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto, Direktur Bank Delta Artha Sidoarjo, Kepala Kantor Cabang BPJS Sidoarjo, Ketua PKDI Sidoarjo, dan Ketua PPD Sidoarjo.

Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut sebagai forum strategis untuk memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa.

"Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, namun merupakan wadah penting bagi BPD dalam memastikan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bupati Subandi menegaskan, BPD memiliki peran penting sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemer-

intah. Ia berharap, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita ingin tidak ada lagi usulan desa yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Aspirasi masyarakat harus benar-benar tersampaikan dan sejalan dengan kebijakan nasional hingga daerah," tegasnya.

Selain membahas arah pembangunan desa, Bupati Subandi juga menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Ia menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan ASN harus sesuai aturan dan berdasarkan kinerja.

Terkait kesejahteraan anggota BPD, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperjuangkan peningkatan jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk manfaat bagi ahli waris jika terjadi musibah," ucapnya.

Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto menegaskan



Raker Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (25/10/25).

pentingnya komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas bagi para anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan serta perumusan kebijakan desa secara profesional dan sesuai regulasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo atas

dukungan terhadap kesejahteraan anggota BPD, termasuk melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan kebijakan tunjangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi turut memaparkan sejumlah program prioritas Pemkab Sidoarjo seperti penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

di beberapa kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat di Tulangan.

"BPD dan kepala desa harus kompak, ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan di desa," pungkas Bupati Subandi. • Loe

CS Dipindai dengan CamScanner

DUTA

Percepat Pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Kehadiran Perda tersebut dinilai penting sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren, sekaligus menjadi landasan hukum dalam pemberian fasilitas yang adil dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren di Gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu siang (25/10/25).

Bupati Sidoarjo H. Subandi menilai, Raperda Fasilitas Pesantren dapat menjadi sarana perlindungan hukum dan penguatan bagi lembaga pendidikan berbasis agama. Kehadirannya diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara pesantren dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan, ekonomi umat, serta pembentukan karakter generasi muda yang religius.

"Terkait pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren ini, kami siap berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo, baik dalam proses pembahasan selanjutnya, penyusunan naskah akademik yang lebih kuat, maupun pe-

nyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ucapnya.

Subandi menegaskan, proses pembentukan Perda tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, forum pesantren, dan tokoh masyarakat. Ia berharap, Perda Fasilitas Pesantren nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

"Hadirnya Raperda Fasilitas Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan," ujarnya.

Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, terdapat sekitar 192 pesantren dengan 14.992 santri di Kabupaten Sidoarjo (data BPS 2020). Menurutnya, jumlah tersebut menjadi alasan kuat pentingnya payung hukum agar pesantren dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo atas inisiatifnya menyusun Raperda Fasilitas Pesantren. Ini langkah nyata bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Sidoarjo," tambahnya. • Loe



CS Dipindai dengan CamScanner

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Hadiri Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Anti Judi Online



Sidoarjo – Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo menghadiri acara Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Anti Judi Online yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi Sidoarjo di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo pada Kamis (23/10).

Acara yang selain dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, juga dihadiri Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo dan berbagai admin media Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru dan organisasi kemasyarakatan ini mengajak semua pihak untuk memerangi judi online.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Riza Ali Faizin, M.Pd.I mengingatkan bahwa judi online seperti lirik lagu Rhoma Irama, selalu menjanjikan kemenangan. Namun, sebenarnya judi hanyalah permainan semata yang tidak akan memenangkan siapapun. "Yang namanya judi sebenarnya dimainkan seperti itu seolah-olah menang", ucapnya.

Raymond Tara Wahyudi, S.T., Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo menekankan bahwa digital sehat adalah tanggung jawab bersama. "Kepada seluruh orang tua, bimbangkanlah, komunikasikanlah, dan ciptakan lingkungan aman di rumah. Kepada para pendidik, alirkanlah literasi digital dan dukunglah siswa yang berprestasi. Mari wujudkan digital yang sehat, aman, dan bermakna untuk semua generasi Indonesia. Kita harus menjadi filter terakhir agar anak-anak kita tidak terjerak dalam lubang kebencuran judi online," ujarnya.

Sementara itu, Kamboji 2 Pindem Satreskrim Polresta Sidoarjo, Heri Kasihanto, SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa judi online adalah candu yang berpotensi merusak masa depan generasi muda dan stabilitas ekonomi keluarga.

"Kami tidak hanya bicara kerugian uang. Judi online itu candu, banyak yang terjebak karena awalnya hanya coba-coba. Lama-lama menjadi ketagihan karena terbuaya ingin menang, kehilangan uang, bahkan merusak hubungan sosial dan keluarganya," ucap Heri Kasihanto.

Heri Kasihanto juga mengingatkan bahwa pelaku judi terancam Pasal 303 KUHP dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp10 juta. Khusus pelaku judi online, jeratan Pasal 27 ayat 2 UU ITE (perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024) menanti dengan ancaman hukuman setara bandar: penjara 10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Menutup sambutannya, Prasata Humas Dinas Komunikasi Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti, S.Sos., M.I.Kom, menyatakan bahwa ancaman judi online dan kejahatan siber telah terdeteksi mengancam infrastruktur daerah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersinergi untuk memerangi judi

online. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan atau mengalami ancaman judi online dan kejahatan siber melalui 110 Call Center Kepolisian demi mewujudkan digital sehat di Kabupaten Sidoarjo agar tetap aman dan terproteksi (dah/").

Pemkab Sidoarjo Dukung Raperda Fasilitasi Pesantren



KaMedia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitasi Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Kehadiran Raperda tersebut sangat penting sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren. Selain itu menjadi landasan hukum dalam memberikan fasilitas yang adil dan berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pesantren di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sabtu, (25/10).

Bupati Sidoarjo H. Subandi memandang Raperda Fasilitasi Pesantren tersebut dapat menjadi sarana dan jaminan hukum serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Menurutnya, hadirnya Raperda Fasilitasi Pesantren akan mendorong kolaborasi pesantren dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan ekonomi untuk serta penguatan karakter generasi muda yang religius.

"Terkait pembentukan Raperda Fasilitasi Pesantren ini, kami akan berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo, baik dalam proses pembahasan selanjutnya, menyusun naskah akademik yang lebih kuat maupun penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi," ucapnya.

Bupati H. Subandi mengatakan akan melibatkan semua pihak dalam kolaborasi pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren tersebut. Di antaranya dengan organisasi keagamaan, forum pesantren maupun tokoh masyarakat. Ia ingin nantinya Raperda Fasilitasi Pesantren tersebut tidak hanya bersifat administratif saja. Namun benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.

"Hadirnya Raperda Fasilitasi Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan," ujarnya.

Bupati H. Subandi mengungkapkan, data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo mencatat hingga lebih ada 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jumlah santri di Kabupaten Sidoarjo mencapai 14.992 santri. Jumlah santri tersebut tercatat BPS Sidoarjo di tahun 2020 lalu. Menurutnya, sangatlah penting untuk memberikan ruang hukum dengan melihat banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar eksistensi pondok pesantren dan santri lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren. Hal ini

merupakan langkah nyata upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Bupati H. Subandi juga mengatakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi saja. Namun juga membangun Sumber Daya Manusia/SDM. Salah satunya SDM para santri untuk dapat menjadi agen perubahan. Menurutnya, santri memiliki peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Santri dapat menjadi role model, teladan, dan contoh akhlak mulia di masyarakat.

"Santri dapat menjadi agent of change, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial, menegakan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan," pungkasnya.

DPRD Sidoarjo Kolaborasi Bersama Pemerintahan Daerah Membentuk Raperda Fasilitas Pesantren



SIDOARJO(KABARZINDO.com)- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo. Kehadiran Renda tersebut sangat penting sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan daerah terhadap eksistensi pesantren. Selain itu menjadi landasan hukum dalam memberikan fasilitas yang adil dan berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (25/10/2025).

Bupati Sidoarjo H. Subandi memandang Raperda Fasilitas Pesantren tersebut dapat menjadi sarana dan jaminan hukum serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Menurutnya, hadirnya Renda Fasilitas Pesantren akan mendorong kolaborasi pesantren dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan ekonomi umat serta penguatan karakter generasi muda yang religius.

"Terkait pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren ini, kami siap berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo, baik dalam proses pembahasan selanjutnya, menyusun naskah akademik yang lebih kuat maupun penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi," ucapnya.

Bupati H. Subandi mengatakan akan melibatkan semua pihak dalam kolaborasi pembentukan Renda tentang Fasilitas Pesantren tersebut. Di antaranya dengan organisasi keagamaan, forum pesantren maupun tokoh masyarakat. Ia ingin nantinya Renda Fasilitas Pesantren tersebut tidak hanya bersifat administratif saja. Namun benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.

"Hadirnya Raperda Fasilitas Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan," ujarnya.

Bupati H. Subandi mengungkapkan, data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo mencatat kurang lebih ada 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jumlah santri di Kabupaten Sidoarjo mencapai 14.992 santri. Jumlah santri tersebut tercatat BPS Sidoarjo di tahun 2020 lalu. Menurutnya sangat penting untuk memberikan payung hukum dengan melihat banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar eksistensi pondok pesantren dan santri lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami mengapresiasi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren. hal ini merupakan langkah nyata upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Bupati H. Subandi juga mengatakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi saja. Namun juga membangun Sumber Daya Manusia/SDM. Salah satunya SDM para santri untuk dapat menjadi agen perubahan. Menurutnya, santri memiliki peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Santri dapat menjadi role model, teladan dan contoh akhlak mulia di masyarakat.

"Santri dapat menjadi agent of change, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai obyek perubahan sosial, menelaah nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan," pungkasnya. (Gita mas)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati Sidoarjo terhadap Penjelasan DPRD Sidoarjo terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren



Sidoarjo. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (26/10/2025), DPRD kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna Penyampaian Pendapat Bupati Sidoarjo terhadap Nota Penjelasan DPRD Sidoarjo terhadap Raperda tentang Fasilitas Pesantren.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suwarno yang dihadiri 17 anggota dewan. Juga dihadiri Bupati Sidoarjo dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Sidoarjo serta para undangan.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suwarno menyampaikan bahwa paripurna ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sidoarjo tentang Penyampaian Pendapat Bupati Sidoarjo terhadap Nota Penjelasan DPRD Sidoarjo tentang Raperda Fasilitas Pesantren, jelasnya.

Selanjutnya, Bupati Sidoarjo, H. Subandi dalam rapat paripurna menyampaikan apresiasinya dan mendukung penuh inisiatif pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren oleh DPRD Sidoarjo sebagai bentuk pengakuan dan kebhinekaan daerah terhadap eksistensi pesantren. Selain itu menjadi landasan hukum dalam memberikan fasilitas yang adil dan berkelanjutan, ungkan Abah Randi-sanaan akrahnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi memandang Raperda Fasilitas Pesantren tersebut dapat menjadi sarana dan jaminan hukum serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Memuncaknya badinya Perda Fasilitas Pesantren akan mendorong kolaborasi pesantren dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan ekonomi umat serta penguatan karakter generasi muda yang religius.

“Terkait pembentukan Raperda Fasilitas Pesantren ini, kami siap berkolaborasi dengan DPRD Sidoarjo, baik dalam proses pembahasan selanjutnya, menyusun naskah akademik yang lebih kuat maupun penyalarsan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” ucapnya.

Bupati H. Subandi mengatakan akan melibatkan semua pihak dalam kolaborasi pembentukan Perda tentang Fasilitas Pesantren tersebut. Di antaranya dengan organisasi keagamaan, forum pesantren maupun tokoh masyarakat. Ia ingin nantinya Perda Fasilitas Pesantren tersebut tidak hanya bersifat administratif saja. Namun benar-benar meninjau kebutuhan real lapangan.



“Hadirnya Rapenda Fasilitasi Pesantren merupakan wujud nyata upaya bersama untuk memberikan dukungan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.” ujarnya.

Bupati H. Subandi mengungkapkan data Kantor Kementerian Agama Sidoarjo mencatat kurang lebih ada 192 pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jumlah santri di Kabupaten Sidoarjo mencapai 14.992 santri. Jumlah santri tersebut tercatat BPS Sidoarjo di tahun 2020 lalu. Menurutnya sangatlah penting untuk memberikan payung hukum dengan melihat banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar eksistensi pondok pesantren dan santri lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan di Kabupaten Sidoarjo.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren, hal ini merupakan langkah nyata upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pesantren di Kabupaten Sidoarjo.” ucapnya.

Bupati H. Subandi juga mengatakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi saja. Namun juga membangun Sumber Daya Manusia/SDM. Salah satunya SDM para santri untuk dapat menjadi agen perubahan. Menurutnya santri memiliki peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Santri dapat menjadi role model, teladan dan contoh akhlak mulia di masyarakat.

“Santri dapat menjadi agent of change, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai obyek perubahan sosial, meniga nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.” pungkasnya (dah)

